



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI MELASARI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 754523

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.925.750.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1836 m2/1 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, WARISAN Rp. 465.750.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 310 m2/1 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/1 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/1 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 294.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOBIL, HONDA CITY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 125.400.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 140.349.489**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 3.485.499.489



III. HUTANG

Rp. 90.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.395.499.489

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.